

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka pada Bab II ini akan membahas mengenai: (1) Kajian teoritis dan (2) Kajian empiris.

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Politik**

Damsar (2010:10) menyimpulkan “politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu (negara) kota. Politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam negara (kota)”. Sehubungan dengan itu Budiardjo (2015:367) menyimpulkan “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik”. Dapat dicontohkan dengan adanya kegiatan misalnya memberikan suara dalam kegiatan pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota dalam suatu partai atau kelompok kepentingan tertentu, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Setiap individu dalam suatu negara berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan partisipasi politik, seperti melaksanakan pemilihan umum, menyalurkan pendapat dapat secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan partisipasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pelaksanaan partisipasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat luas sesuai kemampuannya, baik kesiapan maupun kesempatan oleh masing-masing individu. Perlu adanya kesiapan bagi setiap warga negara agar dapat melaksanakan

partisipasi aktif dalam suatu sistem politik yang ada. Partisipasi politik berhaluan kepada kehendak untuk memengaruhi pemerintah yang sedang berkuasa.

Yaya Mulyana dan Syarief Hidayat (2016:49) dalam studinya mengatakan partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah. Untuk kepentingan pemerintah, partisipasi politik mempunyai 3 fungsi, yakni: mendorong program-program pemerintah, sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi program pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, dan juga sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Selain dari fungsi diatas, Yakin dan Adi (2014:3) juga memberikan pendapat bahwa partisipasi politik juga mempunyai tujuan yaitu guna memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Selain itu, partisipasi politik memiliki kepentingan lain yakni sebagai pengontrol perjalanan suatu sistem. Partisipasi politik dapat juga diartikan sebagai suatu media yang bertujuan dalam pembangunan suatu sistem politik agar mekanisme politik tersebut dapat hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya, sehingga sistem politik bisa berjalan dan memiliki arah serta tujuan yang stabil dan sukses.

Menurut beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah sebuah kegiatan masyarakat dalam suatu negara dari berbagai struktur masyarakat yang bertujuan memberikan pengaruh dalam proses politik untuk menentukan suatu keputusan kebijakan pemerintah serta sebagai mekanisme pengontrol bagi jalannya suatu sistem politik.

### 2.1.1.1 Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan ataupun kesadaran dan kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap sistem politik yang ada di lingkungannya. Sehingga beberapa pengaruh tersebut dapat menentukan berbagai tipe atau bentuk partisipasi dalam suatu masyarakat. Dalam beberapa negara bentuk partisipasi politik yang dimiliki berbeda-beda. Almond dalam Sitepu (2012:70) mengemukakan adanya partisipasi politik dapat dibedakan dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal, terdapat kekerasan maupun revolusioner. Bentuk partisipasi politik dibagi menjadi 2 macam, konvensional dan non konvensional.

Partisipasi dalam konvensional dilakukan melalui pemberian suara (*votting*), adanya diskusi politik, melakukan kegiatan kampanye, membentuk suatu kelompok kepentingan dan ikut serta bergabung di dalamnya dan dilakukan koordinasi maupun komunikasi secara mandiri dengan suatu pejabat politik administrasi. Sedangkan untuk partisipasi dalam bentuk non-konvensional diadakan dengan mengajukan suatu petisi, melakukan demonstrasi, konfrontasi, melakukan aksi mogok, terjadinya tindak kekerasan politik terhadap suatu harta benda, adanya kerusakan, pengeboman, serta pembakaran dan terjadinya tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti adanya penculikan, pembunuhan, dan melakukan perang gerilya revolusi.

Dari uraian pendapat di atas, dilihat dari berbagai tingkat pemahaman, minat serta respon atau tanggapan dari setiap warga negara terhadap politik, bentuk partisipasi politik dibagi menjadi beberapa macam. Perlu diketahui, bahwa bentuk partisipasi politik dibedakan menjadi dua yakni dalam bentuk yang aktif dan pasif.

Bentuk partisipasi aktif dapat meliputi: partisipasi yang dilakukan melalui organisasi politik atau kemasyarakatan, rapat umum atau demonstrasi, penyaluran melalui media massa, memberikan suara dan serta adanya diskusi politik serta adanya tindak kekerasan politik. Sedangkan dalam partisipasi politik pasif dapat meliputi: apatisisme atau tidak adanya kepedulian terhadap jalannya suatu politik. Namun, dari sikap yang dimiliki oleh individu tersebut bahwa dirinya memiliki penilaian tersendiri terhadap suatu politik. Sehingga sikap yang dimiliki tersebut dapat dianggap sebagai partisipasi politik dalam bentuk lain. Menurut Surbakti (2010:184) membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam, yaitu:

#### 2.1.1.1.1 Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif

#### 2.1.1.1.2 Partisipasi Militan-Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional,

partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

#### 2.1.1.1.3 Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak memersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

#### 2.1.1.1.4 Partisipasi Apatis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatitis).

Budiardjo (2008:367) memberikan batasan yang lebih luas mengenai partisipasi politik, yang menurutnya partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan tersebut yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Partisipasi politik

dapat terwujud dalam berbagai bentuk: kegiatan memilih atau pemungutan suara, *lobbying*, kegiatan organisasi dan mencari koneksi (*contacting*).

#### **2.1.1.2 Faktor-Faktor Partisipasi Politik**

Arnstein dalam Mulyana dan Syarief (2016:50) melihat partisipasi politik masyarakat didasarkan pada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir dan dijelaskan secara terperinci, meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.

Pada kesempatan lain Aslamaturrahmah (2017:11) dalam penelitiannya mengungkapkan faktor-faktor partisipasi politik juga dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Surbakti (2010:186) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang yaitu: aspek kesadaran politik seseorang dan menyangkut penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan pemerintahannya.

Dari ketiga pendapat tersebut faktor-faktor partisipasi politik tidak hanya meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat, terhadap proses pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan *public* saja tetapi terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi yaitu *finansial*, seperti yang dikemukakan oleh Frank Lindegeld dalam Mulyana dan Syarief (2016:50), faktor utama yang mendorong seseorang berpartisipasi politik adalah kepuasan

finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan ia akan menjadi apatis. Menurutny, hal ini tidak akan terjadi kepada orang yang memiliki keamanan ekonomi.

Menurut Hetifah Sj. Sumarto (2004:188) ada bermacam-macam faktor yang mendorong kerelaan untuk terlibat ini, bisa karena kepentingan bisa karena solidaritas. Bisa memang karena mempunyai tujuan yang sama, bisa juga karena ingin melakukan langkah bersama walaupun tujuannya berbeda. Apapun faktor yang mendorong, partisipasi akhirnya harus membuahkan kesepakatan tentang tujuan yang hendak dicapai dan tindak yang akan dilakukan bersama. Artinya, apa yang semula bersifat individual harus secara sukarela diubah dan diolah menjadi tujuan dan kepentingan kolektif. Partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah.

## **2.1.2 Pemilihan Kepala Desa**

### **2.1.2.1 Definisi Tentang Desa**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Berdasarkan pengertian umum desa dapat dikatakan sebagai gejala umum yang ada di dunia, baik sebagai komunitas kecil dari tempat tinggalnya ataupun

pemenuhan kebutuhan dari mata pencaharian mereka sesuai dengan ciri-ciri wilayah mereka. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

#### **2.1.2.2 Definisi Tentang Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Menurut Ndaraha (2001) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Unang Sunadjo dalam (Mariani dan Samiruddin, 2017:3) mengatakan bahwa Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Di samping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.



Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemilihan kepala desa dapat dikatakan sebagai pesta rakyat masyarakat desa setempat dimana pada moment tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesempatan untuk dapat menampilkan figur yang dapat melindungi masyarakat desa. Moment tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa setempat yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pengambilan suara. Moment ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang sering kita sebut dengan *luberjurdil*.

#### 2.1.2.2.1 Syarat – Syarat Pencalonan Menjadi Kepala Desa

Perkembangannya pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis diatas materai Rp.6.000,00 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Adapun syarat dan ketentuan untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala desa yakni: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal Calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warganegara Republik Indonesia yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa yang menerangkan bakal Calon Kepala Desa

Selain persyaratan diatas, bagi bakal calon kepala desa yang merupakan mantan terpidana, yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara membuat surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa bakal Calon Kepala Desa merupakan mantan terpidana dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka pada saat kampanye kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah; surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang;

surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa; dan j. pas foto berwarna bakal Calon Kepala Desa berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang biru, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pencalonan Kepala Desa

#### 2.1.2.2.2 Syarat-Syarat yang Dapat Memilih Kepala Desa

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dalam pasal 35 dijelaskan bahwasannya Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, yakni: penduduk Desa yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah; nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk

#### 2.1.2.2.3 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa

dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat. (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Tata cara melakukan pemungutan suara berdasarkan Pasal 48-49 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu, Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan: pembukaan kotak suara; pengeluaran seluruh isi kotak suara; pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa. Pasal 49 ayat (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dan mencatat surat

suara yang rusak dalam berita acara. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

### **2.1.3 Tinjauan Tentang Sikap Politik**

Berkowitz dalam Nurhalim (2014:25) mengatakan “sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan”. Sikap seseorang terhadap objek merupakan perasaan mendukung maupun tidak mendukung pada objek tersebut. La Pierre dalam Nurhalim (2014:25) menyimpulkan “sikap adalah *respons* dalam *stimuli* sosial yang telah terkondisikan”. Sedangkan menurut Second Backman dalam Nurhalim (2014:25) mendefinisikan “sikap sebagai keteraturan dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konoasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Sikap merupakan sebuah tanggapan secara teratur dapat berupa perasaan, pemikiran dan predisposisi tindakan seseorang terhadap keadaan dengan lingkungan di sekitarnya.

Sikap politik itu sendiri dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Apabila sikap politik tersebut merupakan positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan merupakan perilaku positif. Dan berlaku sebaliknya, apabila sikap politik tersebut negatif, maka perilaku yang ditunjukkan merupakan perilaku negatif. Positif atau negatifnya sikap politik seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni ideologi dari pelaku sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang tumbuh pada lingkungan pelaku sikap politik tersebut.

Almond dan verba dalam Simamora (2016: 39), melihat bahwa dalam pandangan individu tentang objek politik terdapat tiga komponen utama didalam sikap politik. Sikap individu terhadap objek politik dapat dilihat dari tiga komponen berikut:

#### 2.1.3.1 Komponen Kognitif

Merupakan reseprentasi apa yang telah dipercayai oleh pemilik sikap

#### 2.1.3.2 Komponen Afektif

Merupakan sebuah aspek yang menyangkut emosional seseorang terhadap suatu objek sikap

#### 2.1.3.3 Komponen Konoatif

Merupakan komponen perilaku dalam menunjukkan bagaimana kecenderungan perilaku pada diri seseorang dengan objek sikap yang dihadapinya

Simamora (2016:39) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sikap politik pada penelitian ini adalah sikap politik yang bersifat internal yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat-pendapat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi politik, sebagai hasil dari penghayatan dari individu dalam masyarakat yang melibatkan komponen kognitif, afektif, dan konatif atau evaluatif terhadap objek atau situasi politik.

#### 2.1.4 Etnis dalam Pemilihan Umum

Terdapat banyak literatur mengatakan dalam perbandingan politik menggambarkan bahwa identitas etnis adalah salah satu kekuatan besar yang dapat membentuk sikap politik seseorang dan perilaku politik massa. Simamora (2016:40) berpendapat bahwa teori dalam dimensi sosiologis menyebutkan bahwa

faktor etnis merupakan variable penting yang dapat menjelaskan bagaimana sikap politik seseorang. Pada kandidat maupun partai politik tertentu dalam proses berpolitik. Dapat ditinjau dengan adanya kesamaan ras maupun etnis antara pemilih dan partai atau kandidat pejabat publik cenderung mempengaruhi sikap politik seseorang.

Istilah etnik yang merupakan sebuah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Begitu juga dalam suatu kelompok etnik para anggotanya memiliki kesamaandalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan atau tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi. Posner dalam Deny J.A (2008: 26) berpendapat bahwa dimensi etnis merupakan faktor penting untuk memahami proses demokrasi. Dimensi etnisitas seperti hubungan keluarga dalam kelompok, bahasa, kebudayaan, agama dan asal daerah menjadi faktor yang dianggap penting baik oleh publik maupun elite ketika peristiwa politik sedang berlangsung.

Sikap politik masyarakat di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor dimensi etnisitas. Terdapat banyak penelitian menjelaskan adanya hubungan antara politik dan faktor etnis di Indonesia. Ananta dalam Ariyanto (2008: 2) menyatakan bahwa aspek etnis tampaknya tidak boleh dilupakan peranannya dalam pemilihan umum, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Latar belakang etnis kandidat memiliki korelasi positif dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih. Etnisitas memberikan efek khusus yang kuat terhadap perilaku politik pada akhir abad ke-21.

Akan adanya kondisi tersebut akan lebih terasa pada wilayah-wilayah yang memiliki perimbangan etnis yang didominasi oleh dua atau tiga etnis dalam wilayah tertentu. Dalam beberapa kasus pemilihan umum yang telah terjadi di Indonesia menggambarkan adanya hubungan yang erat antara faktor etnis pada pemilihan kepala daerah. Ariyanto (2008: 3-19) menjelaskan bagaimana faktor kesamaan etnis berpengaruh terhadap kemenangan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Terdapat beberapa daerah pada level Pemilihan Gubernur memberikan kesimpulan bahwa politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor kesamaan etnis dan agama. Masyarakat cenderung lebih menyukai dan memilih kandidat yang berasal dari suku yang sama.

Apabila ditinjau dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara pelaksanaan pemilihan umum dan dimensi etnisitas seperti hubungan keluarga, adat-istiadat, budaya, hubungan darah, bahasa dan agama terhadap sikap politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kandidat calon dan elite politik cenderung menggunakan pendekatan terhadap etnis untuk dapat mengambil simpatisan warga dan memenangkan suara dalam pemilihan, sedangkan pemilih menggunakan dimensi etnis sebagai preferensi dalam menentukan dukungan dan pilihan politiknya dalam pemilihan umum.

#### **2.1.5 Sikap Politik Etnis Jawa**

Menurut Endraswara (2003) “eksistensi etnis Jawa sudah terdengar berabad-abad silam, Keragaman kebatinan Jawa dan terkemuka di pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Batin manusia sungguh wahana hidup yang sentral, orang Jawa bilang batin itu lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung”. Terdapat maksud pada kalimat tersebut, yakni batin seseorang itu lebih lembut



dibandingkan dengan air. Namun sebaliknya, dia bisa menjadi besar dan kuat melebihi gunung. Menurut Endraswara (2003) "Mencermati Etika kejawen (kejawaan), seperti halnya sedang memintal benang kusut. Mengapa benang, sebab adalah bingkai yang dapat dipergunakan apa saja". Begitupun etika kejawen, banyak hal yang dapat mempengaruhinya.

Menurut Haryanto (2005 : 22) kekuasaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu :

#### 2.1.5.1 Dari kedudukan.

Kedudukan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang karena yang bersangkutan menduduki posisi tadi. Semakin tinggi kedudukan maka akan semakin besar pula kekuasaan yang berada pada genggamannya orang yang menduduki posisi tersebut.

#### 2.1.5.2 Dari kepercayaan.

Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan karena yang bersangkutan memang dipercaya untuk memilikinya atas dasar kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan hanya muncul di masyarakat di mana anggota-anggotanya mempunyai kepercayaan yang dimiliki pemegang kekuasaan.

Budaya Jawa sendiri terlahir dari budaya yang berasal dari Jawa khususnya di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Secara garis besar Budaya dapat dibagi menjadi tiga yaitu budaya Banyumas, budaya Jawa Tengah-DIY dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa keseimbangan, kelarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan

kesederhanaan. Terdapat juga daerah perantauan orang Jawa seperti di Jakarta, Sumatera dan Suriname. Beberapa budaya Jawa yang di minati di luar negeri adalah wayang kulit, keris, batik, kebaya dan gamelang.

Menurut Herusatoto (2000) secara antropologi budaya, etnis Jawa adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan Bahasa Jawa, bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta mereka yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Semua orang Jawa berbudaya satu orientasi kepada kultur Surakarta dan Yogyakarta sebagai sentra kebudayaan Jawa.

Menurut Marbangun Hardjowirogo dalam Simamora (2016:44) etnis Jawa merupakan etnis yang paling besar jumlahnya di Indonesia dan secara umum banyak mendiami pulau Jawa. hal ini lambat laun memunculkan masalah-masalah kependudukan di pulau tersebut ditambah lagi dengan kedatangan etnis lainnya yang tentunya dapat menambah masalah kependudukan di pulau tersebut yakni masalah kepadatan penduduk.

Menurut Russell dalam Simamora (2016:44) kebanyakan orang merasa tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memimpin kelompok mereka untuk meraih kemenangan, dan oleh sebab itu mereka mencari seorang pemimpin yang kelihatannya memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai keunggulan.

#### **2.1.6 Sikap Politik Etnis Madura**

Utsman (2018:25) dalam tulisannya mengatakan budaya Jawa dan Madura ternyata berbeda konteks historis, Jawa dengan tradisi yang kokoh dan didukung ketersediaan dokumen yang melimpah berupa serat-serat yang digunakan orang

Jawa sebagai pedoman tata hidup bermoral dan bersosial membuat penangkapan citra manusia Jawa menjadi mudah. Sedangkan Madura miskin literatur klasik mengenai tata hidup.

Begitu pula dengan moral, Utsman (2018:15) mengatakan masyarakat madura memiliki norma-norma moral sendiri yang dikenal dengan istilah '*tengka*'. Pada penelitian yang dilakukan oleh Utsman juga mengatakan menurut orang Madura '*tengka*' tidak ada di buku-buku (*tengka tade' kitapeh*) ungkapan populer dalam masyarakat Madura yang mengandung pesan mendalam bahwa moral-etika dalam tradisi mereka tidak ada pada ranah-ranah teoritis tetapi praktik, tidak pada ranah ilmiah tapi amaliah.

Masyarakat Madura sendiri percaya terhadap patokan moral hubungan sosial, diamalkan dan diwariskan dari generasi ke generasi kemudian menjadi konsensus dan pegangan hidup mereka hingga saat ini (Utsman, 2018:16). Sebagaimana masyarakat tradisional lain di berbagai wilayah di dunia yang juga memiliki pandangan-pandangan moral dan dilembagakan secara kultural-informal dengan maksud-maksud tertentu seperti merawat keseimbangan sosial hingga keteraturan hidup menurut tafsir mereka.

Kehidupan sosial-politik di Madura dan hubungannya dengan '*tengka*' sebagai penilaian moral mengenal pola-pola tertentu dan menjadikan rukun sebagai prinsipnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utsman konteks pemilihan kepala desa (pilkades) faktor kedekatan geografis menjadi pertimbangan orang Madura dalam memberikan dukungannya kepada calon kepala desa. '*Tengka*' sebagai etika politik desa berdasarkan pertimbangan geografis. Dalam dinamika politik pemilihan kepala daerah (pilkada) pola

*'tengka'* bersifat afiliatif, masyarakat berafiliasi kepada para kiai dalam memberikan dukungan politik. Sedangkan dalam konteks perpolitikan nasional *'tengka'* bercorak ideologis, masyarakat selalu mengedepankan dimensi keislaman dalam menentukan pilihan politik.

## **2.2 Kajian Empiris**

### **2.2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian yang dianggap temanya relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti yakni sebagai berikut:

**2.2.1.1** Penelitian terdahulu yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gunug Pring Kabupaten Magelang” yang disusun oleh Tunjung Darujati pada tahun 2009. Proposal tersebut menggunakan metode kualitatif dengan tujuan penelitian untuk melihat partisipasi politik masyarakat Desa Gunung Pring dalam pemilihan kepala desa. Hasil penelitian tersebut menyebutkan tingkat partisipasi masyarakat desa sudah cukup baik pada pemilihan kepala desa yang sudah terlaksana pada desa tersebut.

Peneliti menganggap penelitian terdahulu ini relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan pada penelitian yang akan dilakukan, karena memiliki kesamaan fokus terhadap partisipasi politik dalam proses pemilihan kepala desa. Namun juga memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan, yang terletak pada judul dan lokasi penelitian yang akan dilakukan.

**2.2.1.2** Penelitian terdahulu berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah” yang ditulis oleh Agung Suharyanto

pada tahun 2014. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat partisipasi politik yang terjadi di Kampung Tanjung yang berada di Kota Binjai, yang dimana kota tersebut dihuni oleh mayoritas penduduk dengan etnis Tionghoa. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu adanya tingkat partisipasi yang aktif dikarenakan adanya faktor rasa simpatik masyarakat Tionghoa terhadap salah satu calon atau terhadap salah satu pasangan walikota yang mereka harapkan dapat memimpin Kota Binjai kearah yang lebih baik.

Peneliti menganggap penelitian terdahulu ini relevan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian yang akan dilakukan, dimana terdapat kesamaan fokus tentang partisipasi politik masyarakat. Namun juga memiliki perbedaan yang terletak pada judul, lokasi penelitian, dan subjek etnis yang diteliti.

2.2.1.3 Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015” yang ditulis oleh Nur Aslamaturrahman dan Alona Dwinata pada tahun 2015. Sebuah penelitian yang mempunyai tujuan yakni untuk melihat bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang dalam pemilihan gubernur adalah partisipasi politik mereka rendah, adapun faktor yang melatar belakangnya yakni faktor kepercayaan kepada pemerintah, faktor sosok kandidat yang ikut dalam pemilihan juga mempengaruhi

keikutsertaan mereka dalam memilih yaitu sosok atau kandidat yang merupakan dari etnis tionghoa yang dimana etnis terbesar di kelurahan tersebut, dan yang ketiga faktor sosialisasi yang kurang. Sedangkan faktor lainnya seperti faktor kesadaran politik, isu ekonomi, dorongan keluarga, visi dan misi calon kandidat, lokasi tempat pemungutan suara, cuaca serta kartu undangan tidak mempengaruhi keikutsertaan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.

Peneliti menganggap penelitian terdahulu in relevan untuk dijadikan pertimbangan pada penelitian yang akan dilakukan, dimana memiliki persamaan fokus terhadap partisipasi politik masyarakat, namun juga memiliki perbedaan yang terletak pada judul, lokasi penelitian.



### 2.3 Kerangka Pikir

Partisipasi politik masyarakat Desa Gondanglegi Kulon dalam pemilihan Kepala Desa

